Drs. HADIYANTO, M.Ed.

MENCARI SOSOK DESENTRALISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pengantar :

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed.

**Penerbit
RINEKA CIPTA**

Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia

*Antile display
di FRC*
Drs. Hadiyanto, M.Ed. *Hadiyanto*

Mencari Sosok
DESENTRALISASI
MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI INDONESIA

Pengantar oleh :
Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.

PENERBIT
RINEKA CIPTA

Sanksi Pelanggaran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta
Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**MENCARI SOSOK DESENTRALISASI
MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Oleh *Drs. Hadiyanto, M.Ed*

Cetakan Pertama, Agustus 2004

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian
maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 36-A, Blok-B No. 5 Jakarta 10210
Telp. (021) 5736640, 5737645. Fax. (021) 5711985

Anggota IKAPI

Dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta

RC. No. : 1211/H/2004

ISBN : 979-518-903-4

Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Po

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan yang tak ternilai harganya kepada penulis untuk menyelesaikan buku 'Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia' ini.

Buku ini merupakan hasil renungan pemikiran, refleksi pengalaman praktis yang penulis dapatkan berkait dengan pengelolaan guru, pembelajaran serta desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia. Buku ini mengungkap empat tema pokok, yaitu tentang pengelolaan guru dan pembelajaran, desentralisasi manajemen pendidikan, dan makna desentralisasi manajemen pendidikan itu bagi guru dan kepala sekolah di Indonesia.

Untuk mewujudkan buku ini penulis mendapat budi baik dari Dra. S. N. Purnamawati, DipEd. Stud; MSp. Ed, yang telah membaca dengan teliti (*proofreading*) ringkasan tulisan dalam bahasa Inggris. Lebih khusus, penulis sangat respek dan salut kepada Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. yang menyambut positif penerbitan buku ini. Di tengah kesibukan mempersiapkan buku terbaru dan makalah permintaan dari berbagai lembaga, dengan antusiasme yang sangat tinggi sebagai layaknya seorang 'resi',

beliau masih bersedia berdiskusi memberi masukan dan berkenan menulis Kata Pengantar sehingga buku ini menjadi lebih layak di hadapan pembaca.

Terwujudnya buku ini juga karena pengertian dan dukungan yang tulus dari istri tercinta Dra. Yuyun Koyum beserta anak-anak tersayang, Austin Haq Putri, Oza Haq Mochamad, dan Hilal Haq Mochamad. Sebagian perhatian, waktu bermain dan belajar mereka telah tersita untuk penyelesaian buku ini untuk kepentingan yang lebih kompleks dan mulia.

Atas segala pengertian, dukungan dan bantuan berbagai pihak di atas, penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan banyak terima kasih. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan tersebut dengan pahala yang setimpal.

Di samping itu, penulis mengharapkan buku ini menjadi buah dari *waladun sho'lihun yad u'lah* dari almarhum kedua orang tua (Mislani Tjokro Hadi Sumarto dan Hj. Suharti) dan sekaligus guru penulis. Tanpa pendidikan, suri teladan, do'a dan semangat keduanya, penulis tidak mungkin mampu menghadirkan karya ini.

Sebagai akhir kata, buku ini masih menyimpan banyak kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran ke arah perbaikan nasib guru dan kualitas manajemen pendidikan di Indonesia. Amien.

Jakarta, April 2004

Hadiyanto

KATA PENGANTAR

Reformasi di bidang pendidikan merupakan upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan yang membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan. Dengan mengambil inti dari kata filsuf John Dewey, reformasi pendidikan juga berarti perbaikan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Untuk itu, reformasi pendidikan memerlukan kepedulian dan perhatian penuh serta sungguh-sungguh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai pesaham (*stakeholders*) pendidikan. Sebagai proses demokratisasi yang sedang menjadi, hal itu tidak bisa dilakukan sembarangan dan serampangan oleh orang-orang yang tidak kompeten meskipun mereka duduk dalam jajaran birokrasi pengelola pendidikan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai interest dan kepedulian terhadap pendidikan.

Sebagai bangsa yang sedang belajar berdemokrasi, reformasi pendidikan di Indonesia tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang dilakukan Amerika Serikat atau negara lain, karena sumber daya manusia Indonesia mempunyai karakteristik heterogenitas budaya dan tingkat pendidikan. Amerika dan negara lain mempunyai sejarah pendidikan yang berbeda dengan

bangsa Indonesia. Perbaikan pendidikan harus berpijak dari kultur bangsanya sendiri.

Dalam proses perbaikan pengelolaan pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan tidak identik dengan memindahkan kekuasaan dan perilaku birokrat pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi manajemen pendidikan memerlukan kesiapan pemerintah daerah dan kapabilitas sumber daya manusianya. Ketidak siapan pemerintah daerah dalam menyikapi perubahan ini akan membuat pengelolaan pendidikan menjadi lebih 'amburadul dan runyam' di tangan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui dan kompeten di bidang manajemen pendidikan.

Buku ini menghadirkan fenomena, ide dan analisis yang menggelitik dari penulis tentang betapa suramnya nasib guru dan pengelolaan pendidikan di Indonesia serta sebagian solusi yang ditawarkan penulis (Bagian Pertama). Kondisi itu menjadi lebih parah karena implementasi desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah belum memperoleh format yang 'pas' dengan kultur masyarakat Indonesia. Contoh yang dihadirkan penulis adalah kesiapan pemerintah daerah dan peranserta komite sekolah dalam rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dengan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan implementasi MBS dengan *block-grant* dari pemerintah pusat. Kesan yang tertangkap adalah, pemerintah daerah masih 'kelabakan' apabila sumber pendanaan pendidikan juga harus didesentralisasi menjadi tanggungan pemerintah daerah (Bagian Kedua dan Ketiga).

Untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia di sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, di Bagian Keempat, penulis menghadirkan tulisan tentang iklim kelas dan iklim sekolah. Kajian yang masih langka ditekuni akademisi dan praktisi pendidikan di Indonesia ini merupakan 'tool' untuk melakukan supervisi di kelas dan di sekolah.

Dengan alat itu, guru maupun kepala sekolah kembali memperoleh kebebasan mereka mengkreasi iklim kelas atau sekolah mereka seperti yang diinginkan oleh 'penghuninya' (*preferred classroom and school climate*).

Dari tulisan-tulisan itu, terungkap bahwa pemikiran, refleksi dan pengalaman-pengalaman langsung penulis 'yang sudah kadung', tetapi bangga menjadi anak guru, akademisi maupun keterlibatannya dalam penelitian—penelitian lokal dan nasional tentang pendidikan dan manajemen pendidikan, merupakan input yang sangat berharga untuk reformasi manajemen pendidikan di Indonesia.

Semoga buku ini dapat menjadi masukan bagi para petinggi pengelola pendidikan di tingkat pusat dan daerah, atau siapa saja yang mau mendengar dan masih benar-benar concern dengan perbaikan manajemen pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru.

Jakarta, April 2004

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc.Ed.	vii

Bagian Pertama

Sosok Nasib Guru di Indonesia

1. Siapa Bangga Menjadi Guru Indonesia	1
☐ Insentif Guru di Indonesia	2
☐ Guru itu Seperti Pedagang Asongan	3
2. Mengentaskan Nasib Guru Indonesia	9
☐ Pendahuluan	10
☐ Guru Ideal	11
☐ Kompetensi Profesional dan Peran Guru	12
☐ Realita Kualitas Guru Indonesia	17
☐ Tumpuan pada LPTK dan Penghargaan Masyarakat	21
☐ Harapan pada Otonomi Daerah	23
3. Perjuangan Memperbaiki Citra Guru Indonesia	25
☐ Pendahuluan	26
☐ Permasalahan Guru dan Kualitas Pendidikan	

☐ Guru sebagai Komponen Utama dalam Sistem Pendidikan	29
☐ Perjuangan untuk Guru	31
☐ Tanggung Jawab Bersama	37

Bagian Kedua

Desentralisasi Manajemen Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia

4. Implementasi Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia	39
☐ Pendahuluan	40
☐ Permasalahan Kesiapan Bangsa	42
☐ Desentralisasi Manajemen Pendidikan	47
☐ Desentralisasi dan Efisiensi Manajemen Pendidikan	50
☐ Tugas dan Fungsi Manajer Pendidikan	51
☐ Profil Manajer Pendidikan di Era Desentralisasi	58
5. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia	61
☐ Pendahuluan	62
☐ Desentralisasi dan Manajemen Berbasis Sekolah	63
☐ Manajemen Berbasis Sekolah	65
☐ Tujuan dan Alasan Diterapkannya MBS di Indonesia	70
☐ Standard Pelayanan Minimal	72
☐ Pengkajian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	73
6. Peranserta Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	81
☐ Pendahuluan	82
☐ Tumpuan Peranserta Masyarakat dan Komite Sekolah	84

☐ Partisipasi Stakeholders dalam Manajemen Berbasis Sekolah	89
☐ Kontrol dan Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah	90
☐ Implementasi MBS di SLTP	90

Bagian Ketiga

Makna Desentralisasi Manajemen Pendidikan bagi Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah

7. Partisipasi Komite Sekolah dalam Rehabilitasi SD/MI dengan Dana Alokasi Khusus (Kasus di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Tanjung Pinang, Tahun 2003)	99
☐ Pendahuluan	100
☐ Kerusakan Prasarana Pendidikan	100
☐ Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Bidang Pendidikan	102
☐ Keraguan terhadap Kemampuan Komite Sekolah dan Inefisiensi Pengelolaan Keuangan	105
☐ Temuan Pemantauan	108
☐ Simpulan	115
8. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi SD/MI dengan Dana Alokasi Khusus (Kasus di Region Sumatera, Tahun 2003)	119
☐ Pendahuluan	120
☐ Temuan Pemantauan	122
☐ Simpulan	129

Bagian Keempat

Makna Manajemen Berbasis Sekolah bagi Guru dan Kepala Sekolah di Indonesia

9. Kebebasan Guru dalam Pembelajaran di Era Desentralisasi Manajemen Pendidikan	133
☐ Pendahuluan	134
☐ Kreatifitas Guru dalam Pembelajaran	138

☐	Pemahaman Guru tentang Desentralisasi Manajemen Pendidikan	138
☐	Skenario Pembelajaran ke Depan	140
☐	Otonomi Guru dalam Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi	146
10.	Kebebasan Guru untuk Mengkreasi Iklim Kelas dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	149
☐	Pendahuluan	150
☐	Iklim Kelas	153
☐	Iklim Kelas dan Tingkah Laku Peserta Didik	157
☐	Iklim Kelas dan Prestasi Belajar	158
☐	Tahap-Tahap Perbaikan Iklim Kelas dalam Manajemen Berbasis Sekolah	160
☐	Implementasi Tahap-Tahap Perbaikan Iklim Kelas	164
☐	Supervisi melalui Perbaikan Iklim Kelas	172
11.	Kebebasan Mengkreasi Iklim Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	175
☐	Pendahuluan	176
☐	Iklim Sekolah	177
☐	Dimensi dan Skala Iklim sekolah	179
☐	Iklim Sekolah, Tingkah Laku, Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja Guru	181
☐	Iklim Sekolah dan Prestasi Belajar Peserta didik	184
☐	Tahap-Tahap Umum dalam Perbaikan Iklim Sekolah	188
☐	Supervisi Berbasis Iklim Sekolah	195
	Daftar Rujukan	197

Bagian Pertama

Sosok Nasib Guru di Indonesia

01

Siapa Bangga Menjadi Guru Indonesia?

Teachers are important element in educational system. Their professionalism should be enhanced to improve the quality of education. They often become scapegoat when the quality of education decreases. However, the appreciation of the Indonesian government and community to them, in term of salary and prosperity are still unsatisfying.

To support their families and any other daily needs, most teachers still have to struggle by exploring any other part-time jobs that will automatically bother their main activities to teach. They are like street salesmen selling their items on the public bus who sometimes have to lie and disappointing the customers.

Insentif Guru di Indonesia

Guru (termasuk dosen) adalah profesi yang pada mulanya dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pekerjaan yang mulia dan luhur (Supriadi, 1999) karena mereka adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan masyarakat, dan masih puluhan karakteristik lagi (Hadiyanto, 2001). Pullias dan Young (1977), menunjukkan bahwa guru itu paling tidak mempunyai 22 peran, di antaranya sebagai: pembimbing, modernis, perantara antar generasi, model, peneliti, pencipta, dan mempunyai kekuasaan dalam ilmu pengetahuan.

Di Amerika Serikat, guru memperoleh penghargaan yang proporsional sehingga tidak mengherankan kalau hasil survei di sana (dalam Sahertian, 1994) menunjukkan bahwa pekerjaan guru menjadi pilihan pertama (31,3%) diikuti pekerjaan perawat (27,1%), pegawai pemerintah (19,1%), pedagang (12,8%) dan ahli hukum (9,7%). Guru menjadi pilihan pertama karena sangat berkait dengan penghargaan finansial (insentif) masyarakat atau negara terhadap profesi itu. Negara-negara maju, seperti Amerika dan Australia memberikan penghargaan yang proporsional kepada guru karena untuk memasuki profesi itu pun diperlukan persyaratan khusus yang tidak mudah diperoleh dengan begitu saja.

Fenomena di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan di Indonesia, di mana pekerjaan guru atau dosen menjadi pilihan terakhir setelah pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti dokter, apoteker, ekonom, hakim, dan bankir. Dari ribuan anak dosen IKIP (LPTK) atau sekarang program kependidikan pada universitas, yang notabene sebagai pendidik calon guru, hanya puluhan anak yang mau masuk lembaga tempat orang tuanya bekerja sebagai pilihan pertamanya. Akhirnya profesi guru itu sekarang tidak diapresiasi oleh angkatan muda (Sutjipto, 2004) dan LPTK tidak pernah diminati oleh putra-putri terbaik bangsa (Republika, 2 Mei 1994) dan hanya menjadi lembaga 'pelarian'.

telah tidak diterima atau kalah bersaing di perguruan tinggi
dan LPTK.

Alasan tidak memilih menjadi guru karena gaji guru sangat
kecil, sering terlambat dan kadang-kadang masih harus disuntik.
Hal itu ibarat sudah jatuh, masih terinjak lagi. Mendagri Rudini,
pernah menyaksikan ada gaji seorang guru yang dipotong 12
persen potongan (Kompas, 26 Desember 1990). Gaji guru
honorer) di sebagian daerah di Indonesia di bawah UMR
(Kompas, 28 April 2000). Di Mungkid, Magelang, guru wiyata
honorer menerima gaji yang nilainya sangat melecehkan
profesi guru dan sangat tidak manusiawi, berkisar Rp. 15.000,-
sampai dengan Rp. 50.000,- per bulan ([http://www.
indonesia.com/bernas/2012/12/UTAMA/12mg1.htm](http://www.indonesia.com/bernas/2012/12/UTAMA/12mg1.htm)).
Sementara itu, menurut Surya (Kompas, 29 Juni 2001) bahwa
perhatian pemerintah terhadap nasib guru masih sebatas retorika
saja.

Apabila dibandingkan dengan gaji guru di negara tetangga,
gaji guru di Indonesia lebih rendah dari gaji guru di negara baru
Timor Timur, dan lebih rendah dibandingkan dengan gaji
tukang parkir di Brunei Darussalam (Haluan, 25 November
2000). Gaji guru pemula (sarjana) di Malaysia mencapai kurang
lebih enam juta rupiah (Singgalang, 24 April 2001) per bulan,
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji utama profesor yang
senior sekalipun. Gaji utama profesor per bulan di Indonesia
'banda-banda' (tidak jauh berbeda) dengan gaji sopir Bus Trans
Jakarta. Di Australia, dua bulan gaji guru dapat digunakan untuk
membeli mobil yang masih layak jalan untuk kerja mereka.

Guru itu Seperti Pedagang Asongan

Pada tahun 1960-an, profesi guru masih cukup menjadi
kebanggaan, paling tidak, penulis merasa bangga menjadi anak
dari Bapak dan Ibu Guru. Namun demikian, kebanggaan itu
sekarang tidak dapat dipertahankan karena penghargaan

masyarakat dan pemerintah terhadap profesi guru masih hanya sekedar untuk hidup 'pas-pasan, gali lobang tutup lobang'. Guru 'Umar Bakri', adalah ilustrasi Iwan Fals tentang nasib guru yang sejak jaman Jepang atau empat puluh tahun mengabdikan dan telah banyak menciptakan menteri tetapi bernasib tragis, hanya mampu naik sepeda kumbang butut.

Terdorong oleh kondisi itu, sebagian guru akhirnya tidak mampu memelihara 'kewibawaan' profesinya, sehingga nyaris tidak ada bedanya antara profesi guru dengan pedagang asongan. Ada tiga persamaan dari kedua 'profesi' tersebut.

Pertama, sebagian guru/dosen maupun pedagang asongan sama-sama memulai kegiatannya dengan 'mencegat' bis atau angkutan kota di persimpangan jalan untuk bersama-sama bergelantungan. Jangan heran kalau ada pedagang asongan, guru atau dosen yang tangannya panjang sebelah karena harus berdiri di bis menggantung tangannya itu sepanjang perjalanan Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi Timur (Jabotabek) atau Padang Lubuk Alung - Padang Pariaman - Bukittinggi - Solok (Palapa Bulok).

Kedua, sebagian guru/dosen maupun pedagang asongan sama-sama menjual 'dagangan basi'. Sebagian guru atau dosen yang tidak pernah '*meng-update*' pengetahuannya sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi, hanya mengandalkan ilmu yang telah diperoleh lima atau sepuluh tahun lalu pada waktu yang bersangkutan kuliah. Catatan untuk mengajar itu telah kumal dan menguning. Hal itu tidak ubahnya seperti pedagang tahu lontong yang menjual dagangan kemarin. Saat pembeli merasakan bahwa makanan yang dibeli itu 'basi', si pedagang asongan sudah turun dan lari dari bis sehingga 'selamat' dari omelan pembeli.

Ketiga, sebagian guru/dosen maupun pedagang asongan sama-sama merangkap jabatan 'tukang copet'. Pekerjaan asongan memang ada yang digunakan sebagai kedok karena

'profesi' yang sebenarnya adalah 'mencopet'. Pekerjaan yang terakhir ini lebih banyak mendatangkan uang, sayangnya cara itu tidak halal. Hal ini mirip dengan yang dilakukan sebagian guru/dosen yang menjiplak skripsi mahasiswa atau karya ilmiah orang lain untuk naik pangkat (*Kompas*, 4 Juni 1996). Cara lain adalah dengan mengajar di berbagai tempat dan masih merangkap berbagai jabatan di sekolah atau perguruan tinggi lain. Aktivitas ini 'mencuri' banyak waktu, karena sering meninggalkan kelas utamanya untuk mengejar kelas lain atau rapat di perguruan tinggi yang membayar lebih mahal. Hasil dari 'copetan' ini jelas lebih menggurkan (*tempted*) dibandingkan dengan mengajar biasa, atau hasil tukang copet konvensional di bis kota Jurusan Kampung Rambutan - Grogol.

Penulis menyadari ilustrasi di atas bukan menggeneralisasi seluruh guru atau dosen dan pedagang asongan. Ilustrasi itu juga tidak berarti untuk merendahkan profesi mereka yang masih memiliki nurani yang tulus dan kejujuran akademis (*academic honesty*). Ilustrasi di atas untuk menggambarkan betapa 'amburadulnya' manajemen guru di Indonesia; kalau penghargaan masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap profesi guru itu masih sekedar 'basa-basi', akhirnya guru pun mau 'nyabet' apa saja di sekeliling mereka yang dapat digunakan untuk 'mengasapi' dapur mereka.

Secercah harapan sebenarnya mulai tampak pada awal pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan politik, melakukan otonomi daerah, termasuk di dalamnya desentralisasi pendidikan. Namun, 'telah jatuh tertimpa tangga', nasib buruk guru di atas diperparah dengan terbuktinya kekhawatiran penulis (*Perspektif Ilmu Pendidikan*, Oktober 2001) menjadi kenyataan, dan orang yang dulunya menolak sinyalemen Teten Masduki dari *Indonesian Corruption Watch* yang menyatakan bahwa pola KKN di pusat berjalan paralel ke daerah seiring dengan otonomi daerah (*Kompas*, 25 Oktober 2001), mulai mengangguk-angguk membenarkan sinyalemen itu.

Diantara beberapa bukti yang memperburuk nasib guru itu diantaranya adalah implementasi desentralisasi manajemen pendidikan di kabupaten/kota malah menumbuhkan penguasa-penguasa daerah yang tidak profesional dan belum bersih dari KKN, sebagiannya malah berpikir terlalu kedaerahan, otonomi daerah diartikan menjadi otonomi putra daerah (otonomi yang kebablasan). Di bidang keuangan, sebagian daerah tidak mampu membayar rapel kenaikan gaji guru tahun 2001, menurut Mendagri, banyak daerah yang melanggar peraturan pemerintah tentang keuangan daerah untuk 'anggaran' DPRD atau kepala daerah (*Kompas*, 20 Februari 2002), dan 40% kepala daerah tingkat II menyelewengkan dana alokasi umum (DAU) daerahnya (*Kompas*, 27 November 2001). Dana bantuan luar negeri, misalnya dari Belanda (*School Improvement Grant Program/SIGP II*) untuk sekolah rusak sebagai akibat bencana alam atau kerusakan, diduga malah ramai-ramai 'diplesetkan' untuk kepentingan pribadi (*Indonesia Corruption Watch*, 2003). *Naudlubillahi min dlaalik.*

Kenyataan di atas cukup mengganggu optimisme otonomi daerah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Namun demikian, sebagai guru, pemerhati dan menekuni bidang manajemen pendidikan, penulis tetap optimis bangsa Indonesia mampu mengatasi *multi dimensional crisis* ini, dan kondisi di atas hanya merupakan konsekuensi sementara dari proses pembelajaran demokratisasi di negeri ini. Optimisme tersebut minimal dilandasi pernyataan presiden Megawati Sukarnoputri yang mengharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai disain besar sistem pendidikan (*Kompas*, 11 Februari 2002). Di samping itu, pemerintah juga telah bertekad mengalokasikan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003), dan dalam perhitungan ketua Bappenas akan dapat dicapai pada tahun 2009 (*Media Indonesia*, 27 Januari 2004).

Semoga pembantu-pembantu presiden dan semua jajaran birokrat pengelola pendidikan 'peka' terhadap pernyataan

presiden dan memegang amanah UUSPN dan menterjemahkannya dalam *policy* pendidikan yang lebih realistis dan nasib guru di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam 'disain besar' tersebut sehingga performen guru tidak lagi mirip pedagang asongan.